

DISERTASI

**PENGATURAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI
KONSUMEN INDONESIA**



Oleh:

**DESI SOMMALIAGUSTINA
NIM. 1930112011**

Komisi Promotor:

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.

Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

Abstrak

PENGATURAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI KONSUMEN INDONESIA

Desi Sommaliagustina

Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2025)

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dapat mempermudah transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri. PMSE menyebabkan jarak interaksi perdagangan semakin kecil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah mekanisme pengaturan perdagangan ASEAN dalam perjanjian ASEAN terhadap perdagangan melalui elektronik (*ASEAN Agreement On Electronic Commerce/AAEC*)? (2) Bagaimanakah harmonisasi hukum mengenai pengaturan perdagangan di ASEAN dengan pengaturan hukum nasional terkait PSME? (3) Bagaimanakah implikasi persetujuan perdagangan ASEAN melalui elektronik terhadap pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia? Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif preskriptif. Di dalam penelitian ini diperoleh, Pertama, pengaturan transaksi dagang PMSE di ASEAN diatur dalam Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, Piagam ASEAN serta dalam Perjanjian ASEAN tentang Perdagangan Melalui Elektronik (AAEC). AAEC terdiri dari 19 (sembilan belas) Pasal yang mengatur antara lain mekanisme dan lingkup kerja sama, fasilitas PMSE lintas batas, keamanan siber, pembayaran elektronik, logistik, transparansi, penyelesaian sengketa, pemberlakuan persetujuan yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan antar wilayah ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerja sama antara Negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN. Dua, terdapat harmonisasi hukum mengenai perdagangan secara elektronik di ASEAN dengan hukum nasional dengan adanya persetujuan ASEAN tentang perdagangan secara elektronik. Tiga, implikasi dari persetujuan perdagangan ASEAN bagi konsumen Indonesia yakni dengan telah diratifikasinya UU Nomor 4 Tahun 2021 terdapat pengaturan hukum nasional lainnya yang mengatur perdagangan secara elektronik di Indonesia yakni Undang-Undang ITE, UU Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Kata Kunci: Pengaturan; Perdagangan, Elektronik; Masyarakat Ekonomi ASEAN;

Implikasi dan Konsumen Indonesia

Abstrack

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY E-COMMERCE ARRANGEMENTS AND ITS IMPLICATIONS FOR CONSUMER INDONESIA

Desi Sommaliagustina

Doctor of LawPprogram, Fakulty of Law, Andalas University (2025)

E-commerce can facilitate transactions both domestically and abroad. E-commerce causes the distance between trade interactions to become smaller. The problems in this research are: (1)What is the mechanism for regulating ASEAN electronic trade (ASEAN Agreement On E-Commerce/AAOC) in the ASEAN Economic Community?;(2)What are the implications of the ASEAN trade agreement through the AAOC for national law related to its ratification through Law Number 4 of 2021?;(3)How is the harmonization of laws regarding trade regulations in ASEAN with national legal regulations related to electronic commerce?The methodology in this research uses normative legal research methods which are descriptive and prescriptive in nature. In this research, it was obtained, First, pThe regulation of e-commerce trade transactions in ASEAN is regulated in the ASEAN Blueprint, the ASEAN Charter and in the AAEC. AAECconsists of 19 (nineteen) articles which regulate, among other things, the mechanism and scope of cooperation, cross-border PMSE facilitation, cyber security, electronic payments, logistics, transparency, dispute resolution, implementation of the Agreement which aims to facilitate trade transactions between ASEAN regions through PMSE, encourage the creation of a conducive environment for the use of PMSE, and increase cooperation between ASEAN Member Countries to develop and encourage the use of PMSE to create inclusive economic growth and reduce disparities in ASEAN. Two, there is harmonization of laws regarding electronic commerce in ASEAN with national laws with the ASEAN agreement on electronic commerce. Three, the implications of the ASEAN trade agreement for consumer Indonesia with the ratification of Law Number 4 of 2021 are other national legal regulations that regulate electronic trade.in Indonesia, namely the ITE Law, Trade Law, and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions

Keywords: E-Commerce Regulations, MEA, Implications, ASEAN Agreement On

E-Commerce